

BAB II

KERJASAMA EKONOMI ANTARA INDONESIA DAN THAILAND PADA TAHUN 1967-1996

2.1 Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Tahun 1967-1996

2.1.1 Pemulihan Ekonomi Oleh Pemerintah Indonesia Pada Tahun 1967-1996

Tahun terakhir pemerintahan Presiden Soekarno ditandai kondisi ekonomi Indonesia dengan hiperinflasi parah yang menyebabkan harga barang pokok naik serta penurunan nilai mata uang Indonesia. Krisis ekonomi menyebabkan terjadinya pergantian kekuasaan kepada Presiden Soeharto pada tahun 1967 yang diresmikan pada 26 Maret 1968. Presiden Soeharto menetapkan pelaksanaan konsep ekonomi Pancasila sebagai orientasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional.¹

Pembangunan ekonomi nasional pada pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi dengan konsep Trilogi Pembangunan di antaranya; 1) Pemerataan pembangunan, 2) Pertumbuhan ekonomi dan 3) Stabilitas nasional.² Pemerintah Indonesia saat itu, memprioritaskan pemulihan ekonomi melalui penerapan program stabilisasi ekonomi dan rehabilitasi nasional.³

¹ R.Z. Leirissa,.G.A. Oho rella,.Yuda B. Tangkilisan. (1996). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Defit Prima Karya.

² Puspa Unsy Shaleha, Anita Selviana dan Indra Muharman. (2024). Sejarah Perkembangan Kebijakan Ekonom Pada Masa Orde Baru dan Pengaruh Kisis Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia. *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah*, 14(2). hlm. 43

³ *Ibid*, hlm.42

Program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dilakukan dengan skala prioritas, salah satunya untuk mengendalikan laju inflasi.⁴ Kebijakan stabilisasi yang dilakukan pemerintah bersifat operasional penyelamatan dengan tujuan menertibkan keuangan negara.⁵ Tindakan yang diutamakan adalah mengambil uang yang menjadi hak negara dan menertibkan prosedur keuangan sekaligus melarang pendanaan domestik atau pencetakan uang. Tindakan lain yang diupayakan pemerintah, di antaranya: 1) Mengadakan operasi pajak, terutama di kota-kota besar untuk meneliti sampai seberapa jauh perusahaan-perusahaan besar milik negara dan swasta memenuhi kewajiban membayar pajak, 2) Penghematan di bidang pengeluaran pemerintah, khususnya pengeluaran yang konsumtif dan rutin. Subsidi untuk perusahaan-perusahaan dihapuskan, 3) Kredit bank dibatasi, kredit impor dihapuskan. Kredit ekspor diberikan apabila bank yakin akan terlaksananya ekspor. Kebijakan kredit ketat dari pemerintah ini merupakan kredit yang selektif dan terarah.

Penerapan kebijakan anggaran yang ketat tersebut dilakukan pemerintah untuk menekan hiperinflasi dan mengurangi volume uang serta mengarahkannya pada bidang yang lebih produktif. Penerapan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi berhasil mengendalikan laju inflasi serta menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.

⁴ Yeby., Ma'asan., Mayrudin. (2018). Menelisik Program pembangunan Nasional Di Era Pemerintahan Soeharto. *Jurnal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 4(1), hlm. 73.

⁵ Soemitro., Djojohadikusumo. (1972). *Kebijaksanaan di Bidang Ekonomi Perdagangan*.

Tabel 2.1 Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pada Tahun 1967-1970

Tahun	Inflasi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persentase PDB (Milliar USD)
1967	112,2	1,4	5,67
1968	85,1	10,9	7,08
1969	9,9	6,8	8,34
1970	8,9	7,5	9,15

Sumber: Bank Indonesia dan World Bank.

Berdasarkan data pada tabel, laju inflasi mengalami penurunan secara signifikan hingga 8,9% menandai keberhasilan program rehabilitasi ekonomi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 10,9% menunjukkan fase pemulihan, namun mengalami penurunan akibat proses penyesuaian terhadap pelaksanaan program pembangunan jangka pendek serta persentase PDB yang menunjukkan tren positif dan stabil. Selama tahun 1967-1970 menggambarkan fase transisi dari pemulihan ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih terarah dan terencana.

Pemerintah mengupayakan proses pemulihan ekonomi dengan perencanaan luar negeri serta dalam negeri. Pelaksanaan pemulihan ekonomi yang dilakukan Presiden Soeharto dengan rencana luar negeri ialah reintegrasi ke dalam ekonomi dunia dengan bergabung kembali Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), World Bank hingga pemberlakuan kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) menyebabkan Indonesia menerima aliran dana serta bantuan

asing.⁶ Hal ini senada dengan teori diplomasi ekonomi menurut Okano-Heijmans yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengupayakan pemulihan ekonomi melalui strategi yang melibatkan kerja sama internasional, negosiasi pinjaman dan investasi, serta kebijakan yang mengintegrasikan kepentingan politik dan ekonomi secara strategis untuk mencapai stabilitas nasional.⁷

Rencana pembangunan dalam negeri diarahkan melalui perencanaan bertahap yaitu program jangka pendek atau Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) serta program jangka panjang. Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengatur kebijakan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.⁸ Penerapan kebijakan tersebut dirancang untuk menyediakan investor domestic serta internasional dalam penyediaan modal, teknologi serta lapangan kerja sebagai strategi dalam memperbaiki perekonomian nasional. Presiden Soeharto secara resmi memulai program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada tahun 1969 dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan sektor pertanian dan industri, termasuk proyek-proyek pembangunan bagi setiap daerah dengan

⁶ Arif Munandar B. (2017). Analisis Konsep Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru Perspektif Kapitalisme dan Islam. *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar. hlm. 24.

⁷ Maaïke, Okano-Heijmans. (2011). Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies. *The Hague Journal of Diplomacy*, 6(1-2).

⁸ Mutiara Yuliana Pratiwi. (2024). Perkembangan Sistem Ekonomi Pada Masa Orde Baru (Rezim Soeharto) Terhadap Sektor Perekonomian Indonesia. *Historia Vitae*, 4(1), hlm. 83.

memanfaatkan kekayaan alam yang menyesuaikan kondisi serta potensi ekonomi masing-masing daerah, agar proses pembangunan dapat berlangsung merata.

Pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah melalui pemanfaatan keberagaman sumber daya alam, menunjukkan hasil alam sebagai modal utama dalam pemenuhan kebutuhan negara. Pemanfaatan hasil sumber daya alam juga dikelola pemerintah untuk diekspor dalam bentuk komoditas. Komoditas ekspor Indonesia yang potensial dibedakan menjadi dua yaitu komoditas migas (Minyak dan Gas) dan komoditas non-migas (Sumber Daya Alam dan Produk Industri Manufaktur).⁹ Kontribusi ekspor migas mendominasi Indonesia sepanjang tahun 1970-an dampak dari ledakan harga minyak dunia atau *oil boom* dengan puncaknya sekitar tahun 1973 hingga 1974. Harga minyak dunia mengalami penurunan secara drastis yang berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia sekitar tahun 1985-1986.

Penurunan harga minyak dunia menyebabkan pemerintah beralih untuk meningkatkan komoditas non-migas dalam perekonomian ekspor Indonesia, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada ekspor migas.¹⁰ Diversifikasi ekonomi untuk ekspor pasca penurunan harga minyak mendorong komoditas non-migas, terutama pada industri manufaktur, sektor tekstil dan produk olahan kayu.

⁹ Eka, A., Purwaningsih, Noviana, E.S., Seta, B., Aris, S., Sakri, G., & Untung, S. (2013). *Analisa Komoditi Ekspor 2006-2012: Sektor Pertanian, Industri, dan Pertambangan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. hlm. 2.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 9.

Tabel 2.2 Data Ekspor Migas dan Ekspor Non-Migas Indonesia Pada
Tahun 1989-1996

Tahun	Nilai Ekspor Migas (US\$ Juta)	Nilai Ekspor Non- Migas (US\$ Juta)
1989	8678.80	13480.10
1990	11071.10	14604.20
1991	10894.90	18247.50
1992	10670.90	23296.10
1993	9745.90	27077.10
1994	9693.60	30359.70
1995	10464.50	34953.70
1996	11722.00	38092.70

Sumber: Katadata¹¹

Berdasarkan tabel, komoditas ekspor migas mengalami fluktuasi sedangkan komoditas ekspor non-migas semakin menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Kontribusi ekspor non-migas semakin dominan berdasarkan data dalam tabel dibandingkan ekspor migas, yang menunjukkan diversifikasi ekonomi menuju sektor industri dan pertanian termasuk manufaktur, tekstil, hasil pertanian serta produk olahan kayu. Pemerintah meletakkan dasar industri sebagai penggerak utama pembangunan nasional terutama pada Pelita IV dan Pelita V selain sektor pertanian, menyebabkan hasil produksi industri manufaktur lebih besar dibandingkan sektor migas.¹² Secara keseluruhan, perubahan struktural terhadap sektor industri telah berperan penting dalam perkembangan

¹¹ Katadata (2020). Badan Pusat Statistik (BPS)/Ekspor Migas dan Non-Migas. Diakses tanggal 19 Juni 2025 dari basis data Databoks.

¹² Syafaruddin, Alwi. (2016). Pergeseran Struktural Sektor Industri. *Economic Journal of Emerging Markets*, 7(1), hlm. 30-31.

perekonomian nasional menghasilkan implikasi positif terhadap pertumbuhan tenaga kerja serta nilai tambah ekspor.

Strategi pemerintahan Soeharto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ialah dengan tiga konsep kebijakan ekonomi yang saling berkaitan, yaitu; *Intensifikasi* yang berlaku dalam produktivitas pertanian, *Deregulasi* sebagai langkah penghapusan aturan-aturan pemerintah yang dapat menghambat aktivitas ekonomi serta *Liberalisasi* yang mencakup penghapusan hambatan perdagangan, pengurangan tarif dan integrasi Indonesia terhadap perdagangan internasional. Perubahan struktural merupakan keharusan dalam perekonomian yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat, ketimpangan sumber daya produksi dan tersedianya modal. Menurut laporan dari *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) menyebutkan bahwa Indonesia telah mengungguli negara-negara berkembang lainnya yang merujuk pada negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dilihat dari kenaikan tahunan dalam nilai ekspor serta hasil industri yang dinilai lebih cepat dan konsisten.

2.1.2 Penanaman Modal Asing di Indonesia

Presiden Soeharto menyadari pentingnya menciptakan iklim investasi yang dapat mendorong terciptanya pembangunan ekonomi nasional. Presiden Soeharto memutuskan untuk menerapkan kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang difokuskan pada sektor-sektor strategis dan padat

modal seperti pertambangan migas (Minyak dan Gas Bumi) dan industri manufaktur yang memang belum digarap pemodal Indonesia.¹³

Perumusan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang dilakukan pemerintah merupakan pengembangan dari Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966.¹⁴ Proses perumusan melalui beberapa tahap, di antaranya; sidang Presidium Kabinet Ampera serta pembentukan tim penyusun sesuai hasil Presidium Kabinet Ampera No. 85/U/Kep/11/1966. Secara formal, landasan hukum dari kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia ialah Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang memuat aturan investasi serta jaminan dan hak-hak bagi para investor asing.¹⁵ Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) disahkan pada tanggal 1 Januari 1967, berhasil membuka peluang besar untuk investor asing membangun perusahaan di Indonesia.¹⁶

Pemerintah Indonesia merubah aturan Penanaman Modal Asing (PMA) diakibatkan regulasi sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan dinamika global. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Jejak Langkah Pak Harto (28 Maret 1968-23 Maret 1973)*. hlm. 46.

¹⁴ Taufik H. Simatupang. (2010). Kebijakan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal Asing (PMA) dalam rangka Meningkatkan Iklim Investasi di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(3), hlm. 191.

¹⁵ Nanda Setia. (2023). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Era Soeharto 1966-1980. *Journal of Indonesian History*. 11(1), hlm. 49.

¹⁶ M. Zulhan Arifin., Jumadi., Najmuddin. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1973. *Jurnal Patingalloang (Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar)*, 5(1), hlm. 109.

tentang Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami revisi ke versi terbaru dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang memberikan dampak signifikan terhadap investasi asing di Indonesia.¹⁷ Perubahan UU ini memperkuat hukum investasi di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum yang jelas dan perlindungan hukum bagi investor asing. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 mengatur hak dan kewajiban investor asing, termasuk dalam kemudahan pengalihan modal, repatriasi keuntungan serta fasilitas fiskal seperti pembebasan bea meterai dan pajak tertentu yang mendorong masuknya modal asing.

Pemerintah mengeluarkan aturan deregulasi untuk mempermudah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia terutama pada akhir tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Aturan deregulasi tersebut, di antaranya: 1) Penyederhanaan izin investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dibentuk pada tahun 1973 untuk mengkoordinasikan Penanaman Modal Asing (PMA), 2) Pengurangan sektor untuk asing, 3) Relaksasi aturan kepemilikan saham asing, memungkinkan hingga 100% kepemilikan asing di beberapa sektor meskipun sering kali tetap diwajibkan menjadi kemitraan dengan lokal. Kebijakan deregulasi membantu menciptakan usaha yang lebih kompetitif dan terbuka sehingga investasi asing yang berorientasi ekspor dapat meningkat secara signifikan. Hal ini

¹⁷ Muhammad, Insa, Ansari. (2020). Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), hlm. 75.

sejalan dengan upaya pemerintah yang mengalihkan ketergantungan dari ekspor minyak ke sektor swasta dan ekspor manufaktur.

Penanaman modal asing di Indonesia berdampak positif bagi masyarakat, di antaranya; mampu menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, menggali kemampuan serta kompetensi tenaga kerja lokal serta mendorong pengusaha lokal untuk berpartisipasi bersama dengan investor asing dalam menciptakan produk barang hingga jasa yang lebih berkualitas. Namun, penanaman modal asing dapat berdampak negatif apabila badan penanaman modal dan pemberi izin tidak melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan serta penindakan yang dijalankan secara konsisten.¹⁸ Pada realitasnya pangsa investasi asing di Indonesia hanya sebesar 6,51%, selebihnya merupakan investasi yang dilakukan oleh PMDM. Penanaman modal asing di Indonesia hanya digunakan sebagai pelengkap saja sebab pertumbuhan investasi mayoritas merupakan hasil dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).¹⁹

2.1.3 Penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dengan tim ekonom teknokrat yang dikenal sebagai *Mafia Berkeleys* seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, dll. Presiden Soeharto mengatakan bahwa landasan utama dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) ialah mengerahkan

¹⁸ Endang, S., Suwarni. (2008). Dampak Perundang - Undangan Penanaman Modal Perekonomian. *Probank*, 1(7).

¹⁹ Taufik H. Simatupang, *op.cit.*, hlm. 195-196.

kemampuan sendiri untuk memaksimalkan mobilisasi sumber keuangan nasional.²⁰ Pelaksanaan Repelita atau dikenal juga Pelita dimulai sejak tanggal 1 April 1969 atas perintah Presiden Soeharto dengan sasaran dan titik berat bidang yang berbeda. Berikut implementasi program Repelita yang disusun oleh pemerintah:

1. Pelita I (1969-1974)

Program Pelita I menjadi landasan awal pembangunan nasional dalam upaya mengejar ketertinggalan ekonomi pasca krisis. Fokus utama Pelita I adalah pembangunan bidang pertanian melalui pembaruan kegiatan pertanian rakyat dari tradisional menjadi modern sekaligus pengembangan bidang industri untuk mengurangi kesenjangan antara sektor agraris dan industri dengan sasaran pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang serta perbaikan infrastruktur dasar.

Kabinet Pembangunan I menentukan Panca Krida sebagai program kerja, yaitu; 1) Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum, 2) Menyusun dan melaksanakan Repelita, 3) Melaksanakan Pemilihan Umum paling lambat 5 Juli 1971, 4) Mengembalikan ketertiban dan keamanan Masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G-30 S/PKI dan setiap ronrongan, penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 dan 5) Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di Tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Jejak Langkah Pak Harto (28 Maret 1968 -23 Maret 1973)*.

Pelaksanaan Repelita I berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang cukup memuaskan, termasuk produksi beras meningkat rata-rata 40% per tahun. Keberhasilan Pelita I tidak lepas dari berbagai kendala dan kekurangan, seperti besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan program tersebut serta kenaikan harga beras ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil. Pelita I berakhir pada tanggal 31 Maret 1974.

2. Pelita II (1974-1979)

Pelita II memperluas fokus pembangunan nasional dengan lima cakupan sasaran, di antaranya; 1) Ketersediaan bahan pangan dan sandang, 2) Ketersediaan perumahan dan fasilitas lain yang diperlukan rakyat, 3) Perluasan sarana dan prasarana, 4) Pemerataan kesejahteraan rakyat dan 5) Meluasnya kesempatan kerja.²¹ Kebijakan tersebut menciptakan struktur perekonomian yang lebih kuat dengan meluasnya lapangan pekerjaan serta penerapan program transmigrasi sebagai langkah pemerataan penduduk dan pemerataan pembangunan.

Prioritas pembangunan pada Pelita II tetap diletakkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Program kerja Kabinet Pembangunan II disebut Sapta Krida, di antaranya; 1) Memelihara dan meningkatkan stabilitas politik, 2) Memelihara dan meningkatkan stabilitas ekonomi, 3) Memelihara dan

²¹ Rizki, Rahmawati. (2022). Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru. *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan*, 9(2), hlm. 39.

meningkatkan keamanan dan ketertiban, 4) Menyelesaikan Pelita I dan melaksanakan Pelita II berdasarkan GBHN, 5) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 6) Meningkatkan penertiban dan pendayagunaan aparatur negara.²² Pelita II menciptakan perubahan dalam perekonomian Indonesia secara signifikan termasuk rata-rata pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7% per tahun, penurunan laju inflasi sekitar 9,5%, mendorong kemajuan sector-sektor lainnya seperti industri pengolahan serta perbaikan infrastruktur. Pelita II berakhir pada 31 Maret 1979.

3. Pelita III (1979-1984)

Program pembangunan Repelita III dimulai pada 1 April 1979 yang menekankan pada perwujudan Trilogi Pembangunan Indonesia dengan penitikberatan 8 jalur pemerataan yang masing-masing memiliki program berbeda.²³ Hasil program dari delapan jalur pemerataan tersebut menunjukkan keberhasilan dalam mencapai pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di Indonesia serta pengolahan bahan baku menjadi barang jadi pada sektor industri.

Kabinet Pembangunan III melakukan tugasnya dengan program yang disebut Sapta Krida. Keberhasilan dalam produksi tanaman padi dalam Pelita III mencapai pertumbuhan rata-rata 6,8% per tahun, hingga mengalami swasembada pangan serta surplus beras.²⁴ Indonesia berhasil

²² Dewi, A.S., Lazuardi, A.S. (2006). *Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto*. Jakarta: Jakarta Citra. Hlm. 159.

²³ Mayrudin, *op.cit.*, hlm. 75.

²⁴ Gunawan Sumodiningrat. (1987). Potensi Pertanian Pedesaan Dan Swasembada Pangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 2. hlm 5.

mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dengan total produksi 25,8 juta ton yang telah mencukupi kebutuhan pangan nasional saat itu. Peningkatan produksi per hektar disertai dengan penerapan Panca Usaha Tani khususnya penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk serta tersedianya air yang cukup. Keberhasilan sektor pertanian diharapkan sebagai basis pembangunan wilayah sekaligus pembangunan nasional.²⁵ Pelita III berakhir pada 31 Maret 1984.

4. Pelita IV (1984-1989)

Pemerintah menfokuskan pembangunan sektor pertanian dalam program Repelita IV untuk melanjutkan pencapaian swasembada pangan dan berhasil menerima penghargaan dari FAO (*Food and Agriculture Organisation*). Pelaksanaan Repelita IV pun berfokus pada pengembangan industri supaya dapat memproduksi mesin secara mandiri terutama industri padat karya sebagai upaya modernisasi pertanian dan industrialisasi Indonesia. Pengembangan industri dilakukan dengan tujuan meningkatkan devisa negara serta meningkatkan nilai tambah dari sumber daya domestik, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Program kerja dari Kabinet Pembangunan IV disebut Panca Krida, yang isinya; 1) Meningkatnya Trilogi Pembangunan yang didukung oleh Ketahanan Nasional yang makin mantap, 2) Meningkatnya pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, 3) Meningkatnya pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam

²⁵ *Ibid*, hlm. 13.

mengembangkan demokrasi Pancasila dan P4 dalam rangka memantapkan Persatuan dan Kesatuan bangsa, 4) Meningkatnya pelaksanaan Politik Luar Negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional dan 5) Terlaksananya Pemilu yang Luber tahun 1987.

Repelita IV mencanangkan peningkatan impor barang dengan rata-rata sebesar 7,87% setiap tahun yang terdiri dari peningkatan impor minyak bumi, gas alam cair dan non-migas. Peningkatan impor non-migas terdiri dari peningkatan barang konsumsi 1,48%, bahan baku 6,79% dan barang modal 11,76%.²⁶ Kondisi penurunan harga minyak pada tahun 1982 dan 1983 mendorong Indonesia mengalihkan focus pembangunan dari ketergantungan ekspor migas ke ekspor non-migas dan industri. Repelita IV berakhir pada 31 Maret 1989.

5. Pelita V (1989-1994)

Program yang dicanangkan dalam Pelita V ialah mengembangkan pengolahan sektor ekspor industri untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor migas.²⁷ Program lainnya juga menekankan terhadap bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan. Perkembangan program Repelita V didorong oleh dukungan pemerintah, instansi terkait serta partisipasi masyarakat yang cukup baik.

Pelita V menghasilkan fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat ditandai dengan penurunan angka kemiskinan secara signifikan, upaya

²⁶ Silalahi, P.R. (2023). *Perekonomian dalam Pelita IV. Analisis CSIS*, (3), hlm. 158-159.

²⁷ Rizki, R., *op.cit.*, hlm. 41.

diversifikasi pertanian, industrialisasi dan pertumbuhan ekspor non-migas yang melampaui ekspor migas serta pembangunan infrastruktur. Pelita V berakhir pada tanggal 31 Maret 1994, yang dapat dikatakan sebagai program sukses oleh pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif meningkat meskipun dengan ketimpangan social serta ketergantungan pada utang luar negeri yang dinilai masih dalam batas wajar.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 1967-1996 menunjukkan nilai yang stabil dengan pola yang fluktuatif akibat pengaruh dari berbagai faktor, seperti kondisi politik serta kebijakan pembangunan ekonomi, namun tetap menunjukkan tren positif berkat upaya pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi, meningkatkan investasi melalui penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, serta mengembangkan sektor pertanian dan industri. Selama periode 1990-1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencapai rata-rata 6-7% per tahun yang didorong oleh ekspor manufaktur dan investasi asing. Pembangunan ekonomi nasional berdasarkan pelaksanaan Repelita menghasilkan perubahan dan kemajuan seperti yang tertera dalam tabel dibawah:

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan, Inflasi dan Jumlah Pengeluaran Pembangunan Setiap Pelita

Periode	Laju Pertumbuhan (%)	Tingkat Inflasi (%)	Pengeluaran Pembangunan (Miliar Rupiah)
Pelita I	8,8	14,9	1232.90
Pelita II	7,2	11,1	9126.40
Pelita III	6,1	13,2	34129.20
Pelita IV	5,2	7,3	50885.10
Pelita V	6,7	8,3	104846.40

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel tersebut menunjukkan bahwa seiring pergantian setiap periode Pelita, mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan signifikan meskipun penitikberatan bidang yang difokuskan berbeda, seperti pertumbuhan sector pertanian yang berkembang dan diarahkan pada sektor industri yang mulai memasok bahan mentah serta menjual barang-barang jadi. Peralihan sasaran sector tersebut berhasil menunjukkan nilai yang fluktuatif pada setiap Pelita.

Secara alamiah, peralihan struktur ekonomi dari dominasi sektor pertanian pada sektor industri dan jasa dimulai dari proses perkembangan serta penggunaan teknik-teknik baru melalui akumulasi modal yang dibentuk dari perolehan surplus kegiatan ekonomi.

Pengembangan sektor industri yang direncanakan mengubah fungsi lahan pertanian ke non-pertanian serta perubahan pada struktur masyarakat petani. Hal ini senada dengan teori pembangunan ekonomi menurut Arthur Lewis yang menjelaskan proses pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dapat dicapai melalui peralihan struktur ekonomi, dari kegiatan tradisional menuju sektor industri. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan Repelita yang dimulai dari pertanian sebagai basis untuk mendukung transisi industrialisasi tenaga kerja dari tradisional ke modern dan akumulasi modal.²⁸ Dengan begitu, antara bidang pertanian, industri dan jasa dapat mencapai keseimbangan pada proses pembangunan ekonomi Indonesia.

²⁸ Douglas, Gollin. (2014). The Lewis Model: A 60-Year Retrospective. *Journal of Economic Perspectives*, 28(3).

2.2 Kondisi Ekonomi Thailand Pada Tahun 1967-1996

2.2.1 Perkembangan Ekonomi Thailand Pada Tahun 1967-1996

Perkembangan ekonomi Thailand menunjukkan transformasi signifikan dari ekonomi agraris yang bergantung pada komoditas primer seperti beras, karet, timah dan jati menjadi ekonomi berbasis industri dan ekspor. Pada tahun 1960 produksi dari sektor pertanian dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Thailand menyumbang sekitar 38,2% sedangkan sektor industri menyumbang 19%. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah Thailand dalam pengembangan ekonomi dirancang melalui kebijakan yang terkoordinasi yaitu program *National Economic and Social Development Plan* (NESDP) yang resmi diterapkan sejak tanggal 1 Januari 1961 serta pengembangan pasar modal seperti Bursa Efek Thailand (SET).¹ Perekonomian Thailand telah tumbuh pada tingkat rata-rata 8% per tahun selama tahun 1960-1969, namun pada tahun setelahnya pemerintah Thailand mulai menerapkan kebijakan industrialisasi dengan focus pembangunan infrastruktur dan promosi ekspor. Pemerintah Thailand melakukan perluasan terhadap produksi pengganti barang impor dalam upaya pertumbuhan ekonomi nasional. Krisis harga minyak mentah pun berdampak pada perekonomian Thailand dengan terjadinya depresi ekonomi, dari tingkat pertumbuhan sebesar 10,4% turun menjadi 5,2% sebaliknya tingkat inflasi menunjukkan kenaikan menjadi 19,7%. Harga minyak yang tinggi mengakibatkan defisit transaksi parah setinggi 7,6% dari PDB dan defisit

¹ set.or.th, "History and Roles" <https://www.set.or.th/en/about/overview/journey>, diakses 10 Mei 2024.

neraca pembayaran sebesar 0,4 miliar dolar AS pada tahun 1979 sementara beban utang luar negeri juga meningkat secara signifikan dengan rasio utang luar negeri mencapai 18,1%.

Pada tahun 1980 untuk menanggulangi situasi ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekspor daripada substitusi impor. Laju pertumbuhan ekspor sebagian besar merupakan barang primer yang di antaranya; beras, timah, karet dan hasil pertanian, namun bersamaan dengan itu ekspor barang industri ikut meningkat terutama tekstil, makanan kaleng, sirkuit transistor, perhiasaan, buah kalengan dan pakan ternak.² Produksi primer telah mendiversifikasi dengan tanaman ladang termasuk jagung, rami, singkong, tebu dan nanas untuk kemudian diproses dan diekspor. Thailand memperluas pada industri manufaktur, berupa perakitan komponen dasar yang berkembang pesat dengan mengandalkan teknologi dan mesin luar negeri. Kebijakan pemerintah Thailand pada periode 1980-1985 ialah memfokuskan pada peningkatan pendapatan dari ekspor pariwisata dan menarik investasi asing dengan langkah, sebagai berikut: 1) Mendevalusi mata uang Baht sebanyak 2 kali pada tahun 1981 dan 1984, 2) Mempromosikan ekspor dan pariwisata, 3) Penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memudahkan dan mendukung penanaman modal langsung dari luar, dan 4) Mengurangi produksi untuk menggantikan impor.

² สุธิประศาสน์เศรษฐ. (1982). วิวัฒนาการระบบเศรษฐกิจไทยในรอบ 200 ปี. *วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง*, 1(1). (Suthi Prasartset. (1982). Evolusi Sistem Ekonomi Thailand Selama 200 Tahun Terakhir. *Jurnal Ekonomi Politik*, 1(1))

Pelaksanaan langkah tersebut mendapat dorongan dengan penyesuaian nilai dolar AS berdasarkan *Plaza Accord* yang berdampak signifikan pada perekonomian Thailand, baik melalui peningkatan daya saing ekspor maupun melalui perubahan investasi asing langsung dan aliran modal. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dalam struktur ekonomi Thailand menyebabkan peningkatan proporsi terhadap sektor industri terutama industri manufaktur serta jasa.

Secara keseluruhan, hasil dari penyesuaian dan perubahan tersebut ialah perekonomian Thailand membaik sejak awal paruh kedua tahun 1980-an bahkan memasuki masa keemasan pertumbuhan ekonomi Thailand atau *bubble economy* dengan rata-rata pertumbuhan 10,3% per tahun selama tahun 1985-1990 sebagai hasil dari kebijakan mempromosikan ekspor, pariwisata dan investasi.³ Kebijakan yang diterapkan oleh Thailand pada periode tersebut sebagai berikut.

1) Mengembangkan pesisir timur menjadi kawasan industri dan komersial menjadikannya pusat ekonomi yang penting dan menarik bagi investor domestik maupun asing. Rencana Pengembangan Pesisir Timur Tahap 1 dimulai pada tahun 1982 dengan kebijakan mendistribusikan kesejahteraan ke daerah-daerah. Pengembangan kawasan timur dibuat untuk mendukung perluasan industri dari wilayah tengah dan relokasi basis

³ ณรงค์ชัยอัครเศรณี. (2004). *เหลี่ยมหลังเล่ห์หน้า 20 ปีเศรษฐกิจไทยในสังคมเศรษฐกิจโลก*. การสัมมนาวิชาการ. (Narongchai Akrasanee. (2004). Menengok ke Belakang dan Menatap ke Depan: 20 Tahun Perekonomian Thailand dalam Masyarakat Ekonomi Dunia. Seminar Akademik).

produksi industri dari luar negeri yang difokuskan pada provinsi Rayong, Chonburi dan Chachoengsao.

2) Arah kebijakan yang berfokus pada perdagangan dan investasi dalam bisnis dasar termasuk mempercepat liberalisasi. *Perdagangan*, perjanjian liberalisasi dibuat dengan negara-negara ASEAN pada bulan Januari 1992. *Investasi*, pemerintah telah mengizinkan perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam proyek kilang minyak, baja dan petrokimia.

Pemerintah Thailand telah mengumumkan penerimaan terhadap pasal 8 *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 1990. Berdasarkan kewajiban tersebut, Thailand tidak akan mengenakan pembatasan pada pembayaran internasional atau transfer uang dengan tujuan bisnis dan tidak akan menggunakan sistem kontrol pembayaran dalam apa pun. Reformasi pasar modal dilakukan Thailand dengan menerbitkan Undang-Undang Komisi Sekuritas dan Bursa Efek dengan membentuk *Securities and Exchange Commission* (SEC) untuk mengawasi dan mempromosikan pasar modal dengan memisahkan lembaga pengawas pasar modal dari lembaga pengawas keuangan Bank Thailand. Kebijakan reformasi pasar modal dan mendorong investasi mengakibatkan masuknya modal asing dalam jumlah besar, baik dalam bentuk investasi langsung, investasi di pasar saham maupun pinjaman luar negeri. Hasilnya perekonomian Thailand berhasil tumbuh pesat sebesar 11,2% pada tahun 1990.

Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan pada pertumbuhan ekonomi Thailand telah disusun dan diintegrasikan dalam *National Economic and*

Social Development Plan (NESDP) yang menjadi panduan komprehensif untuk semua kebijakan ekonomi dan social negara Thailand.

2.2.2 Penerapan National Economic and Social Development Plan (NESDP)

Pemerintah Thailand secara resmi menerapkan program bernama Rencana Pembangunan Ekonomi Nasional atau *National Economic Development Plan* yang disusun oleh *National Economic Development Board* (NEDB) pada tahun 1961. Pada tahun 1972 terjadi perubahan nama program menjadi Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional atau *National Economic and Social Development Plan* (NESDP) untuk menegaskan bahwa pembangunan Thailand tidak hanya berfokus pada ekonomi saja melainkan juga menciptakan kesejahteraan merata serta berkelanjutan. Lembaga yang bertanggungjawab atas penyusunan rencana-rencana pembangunan pun ikut berubah menjadi *National Economic and Social Development Board* (NESDB).

Pemerintah Thailand telah meluncurkan 13 Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional dengan rancangan waktu lima tahun dengan focus yang berbeda sesuai konteks zamannya. Proses perencanaan melibatkan kajian mendalam terhadap kondisi ekonomi nasional dan global, konsultasi serta evaluasi juga dilakukan untuk merumuskan arah pembangunan yang responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan rakyat Thailand. Dasar *National Economic and Social Development Plan* (NESDP) diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri Sarit Thanarat yang berfokus pada industrialisasi serta infrastuktur. Secara keseluruhan

perencanaan negara dalam *National Economic and Social Development Plan* (NESDP) berperan penting dalam strategi pembangunan Thailand dari tahun ke tahun.

1. Rencana Kedua (1967-1971)

Pemerintah pada Rencana Kedua mencanangkan cakupan yang lebih luas untuk memungkinkan penilaian yang lebih realistis terhadap potensi ekonomi secara keseluruhan, sekaligus menentukan langkah-langkah yang diperlukan guna merealisasikan tujuan pembangunan Rencana Kedua.¹ Tujuan utama dari Rencana Kedua ialah estimasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, program-program sektoral dan program-program pengeluaran pembangunan. Penekanan khusus diberikan pada pembangunan sosial untuk menjamin bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi menghasilkan peningkatan standar hidup bagi semua kelompok masyarakat. Pelaksanaan Rencana Kedua dilanjutkan oleh Perdana Menteri Thanom Kittikachorn.

Program pertumbuhan terarah pada sector pertanian dan industry dengan perencanaan, sebagai berikut; 1) menargetkan tingkat pertumbuhan sektor pertanian tahunan sebesar 4,3% dan 2) memperluas pertumbuhan industri seperti kertas, pupuk kimia, baja, perakitan otomotif, semen, tekstil dan manufaktur kayu lapis dengan pertumbuhan laju produksi industri menjadi 11% per tahun. Target pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) selama periode Rencana Kedua adalah 8,5%. Realisasi target

¹ Government Of Thailand. *The Second National Economic And Social Development Plan (1967-1971)*. The National Economic Development Board Office Of The Prime Minister. Bangkok, Thailand.

pembangunan yang membutuhkan tingkat pengeluaran publik dan investasi swasta yang memadai, mengharuskan pemerintah merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang memastikan alokasi sumber daya ekonomi sesuai dengan tujuan pembangunan.

2. Rencana Ketiga (1972-1976)

Rencana Pembangunan Ekonomi Nasional pada periode ini menambahkan bidang social dalam sasarannya, termasuk meningkatkan standar hidup penduduk pedesaan sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan. Tujuan utama Rencana Ketiga ini ialah merestrukturisasi sistem ekonomi dan sosial agar sesuai dengan perubahan situasi ekonomi. Rencana Ketiga memiliki 6 kebijakan percepatan pembangunan nasional, di antaranya: 1) Menyusun kembali sistem ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, 2) Memelihara stabilitas ekonomi, 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan mengurangi kesenjangan pendapatan, 4) Meningkatkan keadilan social, 5) Mengembangkan sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja dan 6) Mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi.²

Pemerintah mengusulkan untuk memperluas pendidikan dasar keseluruh pelosok negeri, termasuk peningkatan kualitas dan perluasan wajib belajar. Pemerintah mendukung kegiatan sektor swasta dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Rencana Pembangunan Ketiga

² Government Of Thailand. *The Third National Economic And Social Development Plan (1972-1976)*. National Economic And Social Development Board Office Of The Prime Minister. Bangkok, Thailand.

menargetkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat tahunan sebesar 7% sementara tingkat pertumbuhan impor akan dipertahankan pada rata-rata 2,8% per tahun.

3. Rencana Keempat (1977-1981)

Target Rencana Keempat adalah pertumbuhan PDB sebesar 7% secara riil per tahun. Penekanan khusus diberikan pada perluasan sektor pertanian dengan target pertumbuhan sebesar 5% per tahun sedangkan target produksi non-pertanian ditetapkan sebesar 7,6% per tahun untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan daerah pedesaan.

Rencana Keempat lebih menekankan pentingnya memajukan keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan hanya menekankan pertumbuhan ekonomi. Selama periode Rencana Keempat, target pertumbuhan ekspor adalah 7,5% per tahun sedangkan jasa diproyeksikan meningkat sebesar 6,7% per tahun. Tingkat pertumbuhan target untuk impor barang dan jasa telah ditetapkan sebesar 6,1% per tahun.

Tabel 2.4 Perekonomian dan Keuangan Selama Periode Rencana Keempat

Item	Tahun				
	1977	1978	1979	1980	1981
Neraca perdagangan (Milliar Baht)	-25.6	-28.5	-47.1	-58.0	-67.3
Tingkat pertumbuhan ekspor (%)	16.7	16.7	29.9	23.6	23.1
Tingkat pertumbuhan impor (%)	34.5	15.3	38.9	23.5	20.9
Rekening giro	-22.6	-23.5	-42.4	-45.1	-53.0

(Milliar Baht)					
Defisit kas pemerintah (Milliar Baht)	-15.1	-11.9	-13.0	-23.3	-10.4
Tingkat inflasi (% per tahun)	6.8	9.6	10.7	17.6	14.0

Sumber: The Fifth National Economic And Social Development Plan

Berdasarkan data pada tabel, tingkat pertumbuhan ekspor dan impor meningkat secara signifikan pada tahun 1979 dibandingkan tahun sebelumnya, akibat strategi pemerintah dalam mendukung produksi ekspor melalui peningkatan impor bahan baku. Hasil pembangunan dari Rencana Keempat adalah pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 7,1%, namun struktur produksi berubah dengan menitikberatkan pada produksi industri. Tingkat inflasi meningkat signifikan terutama pada tahun 1980-1981 yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak saat itu. Hal ini mengakibatkan tingkat pendapatan rata-rata per kapita penduduk pada sektor pertanian menjadi lebih rendah daripada rata-rata nasional.

4. Rencana Kelima (1982-1986)

Rencana Kelima memiliki tujuan utama yaitu menekankan pada “kemajuan ekonomi dengan keselarasan nasional” termasuk dengan merestrukturisasi sektor-sektor produktif utama dan meningkatkan efisiensi ekonomi dalam berbagai sektor terutama sektor pertanian, sektor industri dan penggunaan sumber daya alam untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi dari rencana-rencana sebelumnya. Restrukturisasi sektor pertanian dapat memberikan keadilan yang lebih besar bagi para produsen dan restrukturisasi industri akan mengurangi ketergantungan impor, mendorong

laju ekspor dan menyebarkan kegiatan manufaktur ke daerah-daerah provinsi.³

Rencana Kelima menekankan promosi pola produksi dalam negeri yang konsisten dengan ekspor dan konsumsi dalam negeri, di antaranya; dorongan sektor swasta untuk berinvestasi dan berkembang di daerah-daerah pertanian yang maju termasuk peningkatan produktivitas pertanian melalui penelitian dan penyuluhan untuk meningkatkan hasil panen dan perbaikan penggunaan lahan, air dan sumber daya hutan untuk memberikan hasil yang maksimal. Target untuk ekspansi sektor pertanian adalah 4,5% per tahun.

5. Rencana Keenam (1987-1991)

Rencana Keenam mendefinisikan 2 tujuan utama pada pembangunan nasional, di antaranya;⁴

1) Ekonomi: Mempertahankan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 5% untuk menyerap minimal 3,9 juta orang yang akan memasuki pasar tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pencapaian pertumbuhan tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi serta penyelesaian permasalahan ekonomi selama periode Rencana Kelima.

2) Sosial: Menekankan pembangunan sosial yang dapat maju dengan meningkatkan layanan sosial seperti pendidikan dan kesejahteraan

³ Government of Thailand. *The Fifth National Economic And Social Development Plan (1982-1986)*. National Economic And Social Development Board Office Of The Prime Minister. Bangkok, Thailand.

⁴ Government Of Thailand. *The Sixth National Economic And Social Development Plan (1987-1991)*. National Economic And Social Development Board Office Of The Prime Minister. Bangkok, Thailand.

masyarakat. Identitas nasional, budaya dan sistem nilai dapat dipertahankan dan kualitas hidup meningkat baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan.

Peluang penting bagi perekonomian Thailand selama Rencana Keenam adalah promosi ekspor dan pariwisata agar dapat mengurangi ketergantungan impor. Rencana Keenam perlu menekankan pada peningkatan efisiensi dan kualitas pembangunan dalam rangka mewujudkan target penting untuk meningkatkan daya saing Thailand di pasar luar negeri. Pertumbuhan ekonomi Thailand telah meroket pada periode Rencana Keenam dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berkembang rata-rata 10,5% per tahun.

6. Rencana Ketujuh (1992-1996)

Rencana Ketujuh memiliki 3 tujuan utama yang harus diberikan prioritas seimbang supaya mewujudkan pola pembangunan berkelanjutan. 3 tujuan utama pembangunan tersebut, di antaranya: 1) Mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas, 2) Mendistribusikan kembali pendapatan dan mendesentralisasikan pembangunan ke wilayah serta daerah pedesaan secara lebih luas dan 3) Mempercepat pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas hidup, lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.⁵

⁵ Government of Thailand. *The Sevent National Economic And Social Development Plan (1992-1996)*. National Economic and Social Development Board Office of The Prime Minister. Bangkok, Thailand.

Target pertumbuhan ekonomi pada Rencana Ketujuh menetapkan sebesar 8,2% per tahun. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang seimbang dan upaya pencapaian tiga tujuan utama pembangunan terdapat peluang dan kendala yang perlu dipertimbangkan.

2.2.3 Penerapan Bursa Efek Thailand

Bursa Saham Thailand pertama kali didirikan pada Juli 1962 dalam bentuk kemitraan terbatas. Pada tahun 1963 bursa saham didaftarkan sebagai perusahaan terbatas yang dioperasikan oleh entitas swasta dengan nama *Bangkok Stock Exchange* (BSE). Pendirian Bursa Efek Bangkok tersebut sebagai tempat untuk memperdagangkan saham menunjukkan skala kecil dengan perdagangan manual dan kurangnya regulasi menyebabkan likuiditas rendah disertai omset tahunan yang terus menurun hingga operasi harus dihentikan pada tahun 1970-an. *Bangkok Stock Exchange* (BSE) mengalami kegagalan atas kurangnya dukungan dari pemerintah serta terbatasnya pemahaman masyarakat Thailand mengenai pasar ekuitas.

Pemerintah Thailand kembali mengusulkan pembentukan pasar modal sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Kedua periode tahun 1967-1971 mengenai penyediaan langkah serta alat yang tepat untuk memfasilitasi perdagangan sekuritas. Rencana Pembangunan Nasional Kedua menekankan bahwa peran pasar berperan penting terhadap memobilisasi dana untuk industrialisasi dan pembangunan ekonomi Thailand. Pada tahun 1972, pemerintah Thailand mengambil langkah untuk menciptakan pasar modal dengan mengubah “Pengumuman Dewan Eksekutif No. 58 tentang Pengendalian Usaha Komersial yang

Mempengaruhi Keselamatan dan Kesejahteraan Publik”, yang berdampak pada perluasan dalam pengendalian dan regulasi pemerintah atas operasi perusahaan keuangan dan sekuritas yang beroperasi bebas.

Pada bulan Mei 1974, pemerintah Thailand membuat landasan hukum untuk mendirikan Bursa Efek Thailand yang mulai diberlakukan untuk menyediakan perdagangan sekuritas guna meningkatkan tabungan dan memobilisasi modal domestic. Indeks Bursa Efek Thailand merupakan salah satu indeks pasar saham yang mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di Bursa Saham Thailand. Bursa Efek Thailand atau *Securities Exchange of Thailand* secara resmi beroperasi pada tanggal 30 April 1975.

Pasar modal modern Thailand pada dasarnya dibagi menjadi dua tahap, dimulai dengan *Securities Exchange of Thailand* diikuti dengan pembentukan *Stock Exchange Thailand*. Penamaan *Stock Exchange Thailand* (SET) resmi diubah pada 1 Januari 1991 untuk mencerminkan identitas yang lebih jelas sebagai bursa saham utama negara Thailand, yang diatur oleh Undang-Undang dan diawasi oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC) sebuah badan pemerintah dengan tugas mempromosikan, mengembangkan dan mengawasi pasar modal sejak tahun 1992.⁶ Penerapan *Stock Exchange Thailand* (SET) berdampak pada

⁶ thaipublica.org, "SEC dan penegakan hukum sekuritas untuk mengikuti dinamika global" <https://thaipublica.org/2021/09/law-enforcement-under-dynamic-world-by-securities-exchange-commission/> , diakses pada 20 Juni 2025.

pertumbuhan ekonomi Thailand yang mencatat rata-rata pertumbuhan PDB sekitar 8 hingga 9% per tahun.

2.3 Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Antara Indonesia dan Thailand Pada Tahun 1967-1996

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Thailand berlandaskan kontribusi keduanya sebagai negara anggota pendiri ASEAN atau *Association of Southeast Asian Nations* pada tahun 1967 yang dibentuk atas komitmen memperkuat kerjasama ekonomi bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara melalui upaya memfasilitasi perdagangan bebas, investasi serta kerjasama dalam berbagai bidang. Hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan Thailand masih tergolong sederhana dengan tidak ditemukannya perjanjian perdagangan bilateral antara keduanya. Kerangka kerja regional ASEAN memfasilitasi perdagangan dengan penandatanganan *ASEAN Preferential Trading Arrangements* (PTA) pada 24 Februari 1977 dengan tujuan mengurangi tarif untuk barang-barang tertentu yang diperdagangkan negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia dan Thailand.⁷

Indonesia dan Thailand telah melakukan ekspor-impor dalam komoditas beras, gula serta kopi. Perdagangan bilateral telah dilakukan Thailand sejak tahun 1976 dalam komoditas kopi jenis robusta pada Indonesia dengan total 60.000 ton pada tahun 1991 hingga 1992.⁸ Menurut Jetr Sjaritkul, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras utama

⁷ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya ASEAN, <https://kemlu.go.id/kebijakan/asean/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean?type=publication>, diakses 23 Juni 2025.

⁸ Siska, F., Nunung, N., Manuntun, P. (2016). Analisis Pengembangan Ekspor Kopi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 5(1), hlm. 79.

Thailand dengan jumlah impor terbesar pada tahun 1977 yang mencapai 70.000 ton beras. Indonesia sebagai eksportir minyak mentah, mengimpor pada Thailand sebanyak 10.000 barrel yang meningkat menjadi 15.000 barrel pada tahun 1981. Sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an volume perdagangan kedua negara relatif kecil sebab masih dalam tahap awal pengembangan.

Pada bulan Januari tahun 1992 dibentuk *ASEAN Free Trade Area* atau AFTA melalui penandatanganan *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* di Singapura.⁹ Tujuan pembentukan kebijakan tersebut untuk mengurangi tarif perdagangan antar negara anggota ASEAN 0 hingga 5% melalui skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT).¹⁰ Kesepakatan perdagangan bebas tersebut salah satu bentuk upaya ASEAN untuk meningkatkan serta memberdayakan perekonomian di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menjadi landasan dalam meningkatkan hubungan ekonomi serta mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand.

Kesepakatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Thailand ditangani oleh masing-masing Menteri Luar Negeri pada pertemuan di Bangkok yang menghasilkan Kesepakatan Kerjasama Ekonomi dan Teknik (*Agreement on Economic and Technical Cooperation*) yang ditandatangani pada tanggal 18 Januari 1992. Dampak utamanya ialah terwujudnya

⁹ Bustanul Arifin. (2001). *Pertanian Era Transisi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press. hlm. 35.

¹⁰ *Ibid*, hlm.36.

kerangka dasar untuk memacu kerjasama yang lebih terstruktur dan sistematis pada berbagai bidang ekonomi dan teknis termasuk investasi dan perdagangan. Kesepakatan tersebut juga berdampak langsung pada pembentukan forum Komisi Bersama yang dikenal juga *The Joint Commission between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand* atau *Joint Commission Meeting/JCM*.¹¹

Pertemuan perdana Komisi Bersama ini dilaksanakan pada tanggal 4-5 Maret 1992 yang bertempat di Jakarta serta tanggal 26-27 Agustus 1994 di Bangkok sebagai bentuk mengoptimalkan hubungan kerjasama serta memperluas sektor-sektor potensial dalam hubungan kerjasama keduanya, dan selanjutnya menjadi mekanisme rutin untuk mengkoordinasikan dan mengembangkan hubungan bilateral Indonesia dan Thailand secara sistematis. Perkembangan hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Thailand mencerminkan komitmen keduanya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1 Komoditas Utama dalam Kerjasama Ekonomi Antara Indonesia dan Thailand Pada Tahun 1967-1996

Indonesia dan Thailand dianugerahi kekayaan alam melimpah yang dapat dimanfaatkan oleh kedua negara sebagai modal utama dalam mengembangkan berbagai sektor ekonomi. Landasan utama dalam hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan Thailand adalah aktivitas

¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024) Laporan Kunjungan: Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR-RI – Parlemen Thailand. Badan Kerja Sama Antar Parlemen, hlm. 9.

ekspor-impor dengan komoditas yang dimiliki sebagai bentuk dukungan bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing.

Komoditas utama dalam hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan Thailand mengalami perubahan dan peningkatan setiap tahunnya sesuai kebutuhan pasar dan perkembangan industri kedua negara. Adapun komoditas utama dalam hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan Thailand dibedakan menjadi beberapa periode, di antaranya:

1) Periode Tahun 1967 hingga 1970-an

Komoditas utama pada periode ini adalah bahan baku seperti beras, minyak dan hasil pertanian seperti kopi, karet, kelapa sawit dan kayu. Indonesia mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan seperti komoditas kelapa sawit, karet serta produk kayu yang berkembang pesat sejak tahun 1970-an dengan dukungan investasi asing. Daerah penghasil kelapa sawit dan karet terbanyak di Indonesia ialah Kalimantan dan Sumatera.¹² Thailand menjadikan beras sebagai komoditas ekspor utama ke Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi kedua negara pada masa itu masih sangat bergantung pada sumber daya alam serta produk pertanian sebagai basis utama ekspor dan kerjasama ekonomi regional.

2) Periode Tahun 1980-an

Pada periode ini, kedua negara telah beralih dari sector pertanian dan mulai mengembangkan sektor industry. Indonesia menjadi salah satu

¹² Muhammad, David. (2025). Rasionalitas Petani dalam Memutuskan Konversi Lahan Komoditi di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu. *Arus Jurnal Sosial Humaniora*, 5(1), hlm. 501.

eksportir minyak bumi terbesar di ASEAN termasuk kepada Thailand, dan ketika harga minyak dunia jatuh Indonesia mendorong ekspor non-migas. Sedangkan, Thailand unggul dalam ekspor produk pertanian, terutama beras berkualitas, karet, gula, tapioka, dan produk perikanan serta industri manufaktur seperti elektronik dan otomotif.

Pertumbuhan ekspor Indonesia ke Thailand meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Thailand yang pesat dengan penambahan komoditi dari tahun sebelumnya, di antaranya pada beberapa produk pertanian, tekstil dan barang elektronik.

3) Periode Tahun 1990-an

Memasuki tahun 1990-an, komoditas dalam hubungan kerjasama Indonesia dan Thailand mengalami perkembangan. Pertumbuhan komoditas ekspor Indonesia ke Thailand didominasi bahan kimia, minyak pelumas untuk rem hidrolis, batu bara, produk logam, mesin listrik beserta suku cadangnya, produk tekstil, dan hasil laut seperti ikan segar dan produk perikanan lainnya. Sementara itu, ekspor Thailand ke Indonesia didominasi oleh beras, gula, jagung, pesawat telekomunikasi, bahan kimia, mesin pengolah makanan, serat buatan serta produk otomotif seperti mesin mobil dan suku cadangnya. Peningkatan nilai ekspor non-migas Indonesia ke Thailand menunjukkan diversifikasi produk yang signifikan.

Secara keseluruhan, periode-periode tersebut menunjukkan perubahan fokus komoditas sesuai dengan keunggulan komparatif dan permintaan domestik maupun regional. Perkembangan komoditas utama dalam

kerjasama ekonomi Indonesia dan Thailand dipengaruhi oleh kebutuhan pasar yang berubah, kemajuan teknologi, kebijakan perdagangan serta sinergi dalam produksi dan distribusi yang terus meningkat setiap tahunnya.

2.3.2 Faktor Pendorong Kerjasama Ekonomi Antara Indonesia dan Thailand Pada Tahun 1967-1996

Hubungan Indonesia dan Thailand sebagai mitra dagang serta investor utama satu sama lain menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan serta saling mendukung pencapaian pembangunan nasional masing-masing negara.

Hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Thailand didukung oleh beberapa faktor yang menciptakan fondasi kuat dalam memaksimalkan kerjasama ekonomi berkelanjutan. Beberapa faktor tersebut berpotensi meningkatkan kolaborasi ekonomi kedua negara secara efektif, stabil dan tahan lama. Adapun faktor pendukung dalam hubungan kerjasama ekonomi keduanya ialah:

a. Kedekatan antara Pemimpin Kedua Negara

Kedekatan pemimpin suatu negara berpengaruh besar sebagai upaya memperkuat hubungan kerjasama bilateral, khususnya antara Indonesia dan Thailand. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand dimulai oleh kedekatan antara Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya dan Raja Rama V (Raja Chulalongkorn) dari Kerajaan Siam.¹³ Hubungan tersebut

¹³ Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok. (2020). *Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand*. hlm. 38.

berkembang hingga resmi dikonsolidasi kedua negara pada tanggal 7 Maret 1950.

Thailand memiliki kebiasaan untuk kunjungan tingkat Perdana Menteri yang baru terpilih untuk mengunjungi negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Perdana Menteri Thailand yang pernah mengunjungi Indonesia ialah, Kriangsak Chomanan (1978), Prem Tinsulanonda (1980), Anand Panyarachun (1991) dan Chuan Leekpai (1993 dan 1998).¹⁴ Kedekatan antara pemimpin negara sangat berpengaruh dalam hubungan kerjasama ekonomi, di antaranya; mempermudah kunjungan atau pertemuan bilateral yang dapat menghasilkan kesepakatan ekonomi baru serta mempercepat negosiasi. Hubungan antara kedua pemimpin yang harmonis dapat menciptakan iklim perdagangan yang stabil selain itu Thailand telah dinggap menjadi salah satu mitra penting Indonesia di negara kawasan Asia Tenggara.

b. Kedekatan Geografis

Indonesia dan Thailand memiliki kedekatan geografis dalam satu kawasan Asia Tenggara walaupun tidak berbatasan langsung. Berdasarkan letak geografisnya, Thailand berada di sebelah utara Indonesia yang dipisahkan oleh Laut Andaman dan Selat Malaka.

Indonesia dan Thailand harus memanfaatkan kedekatan geografis di kawasan Asia Tenggara ini yang dinilai strategis untuk memperkuat perdagangan bilateral serta mendorong kerjasama ekonomi. Kedekatan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 41.

geografis yang dimaksimalkan dalam kerjasama ekonomi menghasilkan dampak positif, yaitu meningkatkan volume perdagangan dan penanaman investasi.

c. Ruang Lingkup ASEAN

Menurut sejarah, Indonesia dan Thailand merupakan salah satu negara yang berkontribusi dalam keanggotaan ASEAN. Pembentukan ASEAN diusulkan oleh 5 negara pendiri melalui persetujuan masing-masing menteri luar negeri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.¹⁵ Adanya organisasi ASEAN mempermudah proses komunikasi negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk melakukan kontak kerjasama.

Keikutsertaan Indonesia dan Thailand dalam organisasi ASEAN dimanfaatkan keduanya dengan positif untuk meningkatkan kondisi perekonomian keduanya serta memperkuat hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi yang berfokus pada perdagangan dan investasi. Dengan bergabung ASEAN, setidaknya dalam hubungan kerjasama ekonomi tersebut dapat mengurangi hambatan perdagangan Indonesia dan Thailand termasuk arus barang dan jasa yang lebih lancar serta peningkatan aktivitas ekspor-impor kedua negara.

d. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap negara akan berbeda-beda tergantung kondisi iklim serta tanah wilayah tersebut. Indonesia dan

¹⁵ Kementerian Luar Negeri RI & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). *Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Dasar*. Jakarta: Media Grafika.

Thailand sebagai negara beriklim tropis dengan tanah yang subur berpotensi menghasilkan keberagaman sumber daya alam yang melimpah.

Potensi keberagaman alam tersebut mempengaruhi hubungan kerjasama dengan signifikan terutama dalam menciptakan kemitraan yang saling melengkapi serta menguntungkan bagi Indonesia maupun Thailand. Pemanfaatan potensi alam tersebut mampu mendorong kerjasama secara maksimal pada pengembangan ekonomi, perdagangan komoditas, peningkatan aktivitas ekspor-impor kedua negara bahkan pengembangan industri sekaligus pertukaran teknologi dalam bidang pertanian.

2.3.3 Tantangan Kerjasama Ekonomi Antara Indonesia dan Thailand Pada Tahun 1967-1996

Hubungan bilateral Indonesia dan Thailand dalam kerjasama ekonomi berlangsung relatif lancar sebab didorong oleh kedekatan geografis serta kepentingan politik-ekonomi, namun terdapat berbagai tantangan termasuk kendala akses informasi mengenai nilai pasar, pola konsumen serta beberapa aturan perdagangan.¹⁶ Kedua negara ini juga berada pada tahap pembangunan yang berbeda dan memiliki struktur ekonomi yang berbeda

Tantangan utamanya adalah persaingan dalam sektor industri dan ekspor, khususnya dalam bidang otomotif, pertanian dan manufaktur ringan. Thailand dikenal sebagai basis produksi otomotif di ASEAN, sementara Indonesia juga berupaya memperkuat industri serupa, yang dapat menimbulkan persaingan pasar alih-alih kolaborasi. Ketidakseimbangan

¹⁶ Anindya Belva Carissa, Rizal Fahmi, Nadira Hayfa Rizka, Rinandita Wikansari. (2025). Peraturan Perdagangan Internasional Di Asean Dan Rrt: Tantangan Dan Peluang Bagi UMKM. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(1).

neraca perdagangan kerap muncul, di mana Indonesia lebih banyak mengimpor barang jadi dari Thailand dibanding mengeksport produk bernilai tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan Indonesia pada barang impor Thailand. Perbedaan kebijakan investasi, hambatan non-tarif, dan prosedur birokrasi juga menghambat kelancaran arus barang, jasa bahkan modal antara kedua negara.

Tantangan lainnya adalah kurangnya sinergi dalam pengembangan sektor ekonomi berbasis digital dan energi terbarukan, di mana kedua negara masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Perdagangan beras dari Thailand ke Indonesia pun bukan tanpa tantangan, fluktuasi biaya impor beras Thailand dapat berdampak negatif pada ketahanan pangan nasional. Ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan domestik, menyebabkan pemerintah tidak mempunyai kontrol yang efektif terhadap kualitas dan kuantitas beras yang diperoleh.

Secara keseluruhan, langkah yang harus dilakukan dalam memperkuat hubungan kerjasama ekonomi untuk saling menguntungkan ialah kedua negara perlu meningkatkan transparansi kebijakan, memperkuat integrasi rantai pasok regional dan mendorong kerja sama lintas sektor yang lebih inovatif dan inklusif. Hubungan yang harmonis tanpa konflik antara Indonesia dan Thailand memberikan peluang besar bagi pengembangan kerjasama bilateral diberbagai sektor terutama ekonomi.